

LAPORAN SURVEY PERSEPSI ANTI
KORUPSI PERIODE TRIWULAN III
TAHUN 2023



Disusun oleh:

**PENGADILAN NEGERI PHI/TIPIKOR
SERANG KELAS 1 A**

*Jl. Raya Pandeglang Km. 6 Serang-Banten
Telp.(0254) 200644-200940, Faksimili (0254) ext 107
Email : PNSerang12@gmail.com*

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI SERANG KELAS IA

*Pengadilan Negeri Serang
Mahkamah Agung – Maju
Badilum - Sukses
Zona Integritas – Bermutu
PN Serang – Luar Biasa
PN Serang – Luar Biasa
PN Serang – Luar Biasa*

Disahkan Di : Serang
Tanggal : 5 Oktober 2023

Ketua Pengadilan Negeri Serang



NURHADI

Ketua Tim Survey



LILIK SUGIHARTONO

KATA PENGANTAR

Laporan Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas 1A ini disusun sebagai bagian dari tugas untuk melaporkan proses pelaksanaan kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas 1A pada tahun 2023 sekaligus sebagai tolak ukur komitmen Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas 1A menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Laporan akhir ini juga sebagai bahan evaluasi bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas 1A.

Demikian laporan akhir ini kami susun, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 5 Oktober 2023
Ketua Tim Survey



LILIK SUGIHARTONO

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Tujuan Dan Sasaran	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja	3
1.4.1 Persiapan.....	3
1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data	3
1.4.3 Metode Survei.....	4
BAB II METODOLOGI	5
2.1. Metodologi Penelitian.....	5
2.1. Populasi dan Sampel	5
2.2. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	5
2.3. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control.....	6
2.4. Teknik Analisis Data	6
2.5. Tahapan Pelaksanaan	7
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI	9
3.1. Profil Responden	9
3.1.1 Tingkat pendidikan responden	9
3.1.2 Pekerjaan responden	9
3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator	10
3.2.1 Indeks pada indikator manipulasi peraturan	10
3.2.2 Indeks pada penyalahgunaan jabatan.....	10
3.2.3 Indeks pada indikator menjual pengaruh.....	11
3.2.4 Indeks pada indikator transaksi biaya	11
3.2.5 Indeks pada indikator biaya tambahan	12
3.2.6 Indeks pada indikator hadiah.....	12
3.2.7 Indeks pada indikator transparansi biaya	13
3.2.8 Indeks pada indikator percaloan.....	13

3.2.9	Indeks pada indikator perbuatan curang.....	14
3.2.10	Indeks pada indikator transaksi rahasia.....	14
3.3	Indeks persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Serang	15
3.4	Persepsi responden terhadap Kualitas Pelayanan.....	16

BAB IV PENUTUP	17
4.1. Kesimpulan.....	17
4.2. Rekomendasi.....	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Model alur penyusuna survey IPK Menuju ZI	7
Tabel 2. Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi.....	7
Tabel 3. Nilai Persepsi.....	8
Tabel 4. Tingkat pendidikan responden	9
Tabel 5. Jenis pekerjaan responden.....	10
Tabel 6. Indeks pada indikator manipulasi peraturan.....	10
Tabel 7. Indeks pada penyalahgunaan jabatan	11
Tabel 8. Indeks Menjual Pengaruh	11
Tabel 9. Indeks pada Transaksi Biaya	12
Tabel 10. Indeks pada Biaya Tambahan	12
Tabel 11. Indeks pada Hadiah.....	13
Tabel 12. Indeks pada indikator transparansi biaya	13
Tabel 13. Tabel indeks pada Percaloan.....	14
Tabel 14. Indeks pada indikator Perbuatan Curang	14
Tabel 15. Indeks pada indikator Transaksi rahasia	15
Tabel 16. Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Serang.....	15
Tabel 17. Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Serang	16
Tabel 18. Masukan dan pandangan pengguna layanan.....	16

LAMPIRAN

- A. Kuesioner
- B. Hasil Perhitungan IPK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan merupakan satuan kerja yang mempunyai peran dan penyelenggara fungsi layanan yang strategis kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai dari potensi suap dan pungli dalam memberikan pelayanannya. Sejak Tahun 2016, Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A telah memperoleh Penilaian Akreditasi dengan nilai **A Excellent**, prestasi tersebut membuktikan bahwa dengan adanya kerja keras dan komitmen yang kuat sehingga Pengadilan Negeri Serang Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A dapat mempertahankannya. Oleh karena itu sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Instansi Pemerintah yang bersih dan melayani. Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A merupakan unit kerja yang memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis para pencari keadilan serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A yang akan di tetapkan oleh Pengadilan Tinggi Banten menjadi *Pilot Project* menuju wilayah

bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu memperoleh masukan dari masyarakat dalam memperoleh pelayanan dilingkungannya.

Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sasaran penyusunan laporan Survey Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A adalah:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Serang.

Survey disusun berdasar rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani semua para pencari keadilan.

C. Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

D. Rencana Kerja

Persiapan

Sebelum melaksanakan survey persepsi anti korupsi, beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner;
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar;
 - c. Kelengkapan peralatan.
 - d. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data;
 - e. Penyusunan Jadwal
 - f. Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

Pelaksanaan Pengumpulan Data

- a. Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan didalam kuesioner.
- b. Pengisian kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan ditempat yang telah

disediakan.

- c. Pengujian kualitas dan validitas data.
- d. Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

Rencana Kerja Tim Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri
Serang Kelas IA Triwulan III Tahun 2023

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Persiapan	29 - 30 Juni 2023
2	Pelaksanaan Survey/ Pengumpulan Data	3 Juli - 29 September 2023
3	Pengolahan Data	29 September 2023
4	Penyusunan dan Pelaporan	29 September 2023
5	Pengesahan	5 Oktober 2023

Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

A. Metode Penelitian

Penelitian Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

C. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A. Unit analisis survei ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan.

D. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang

dikumpulkan melalui instrumen kuesioner dengan melalui Website Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Hakim Pengawas. Hakim Pengawas akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan Survey Persepsi Anti Korupsi.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeke persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Survey Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI.**

F. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrument yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini.

Tabel 1

Model alur penyusunan Survey Persepsi Anti Korupsi menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup Survei Presepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3
Nilai Persepsi

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

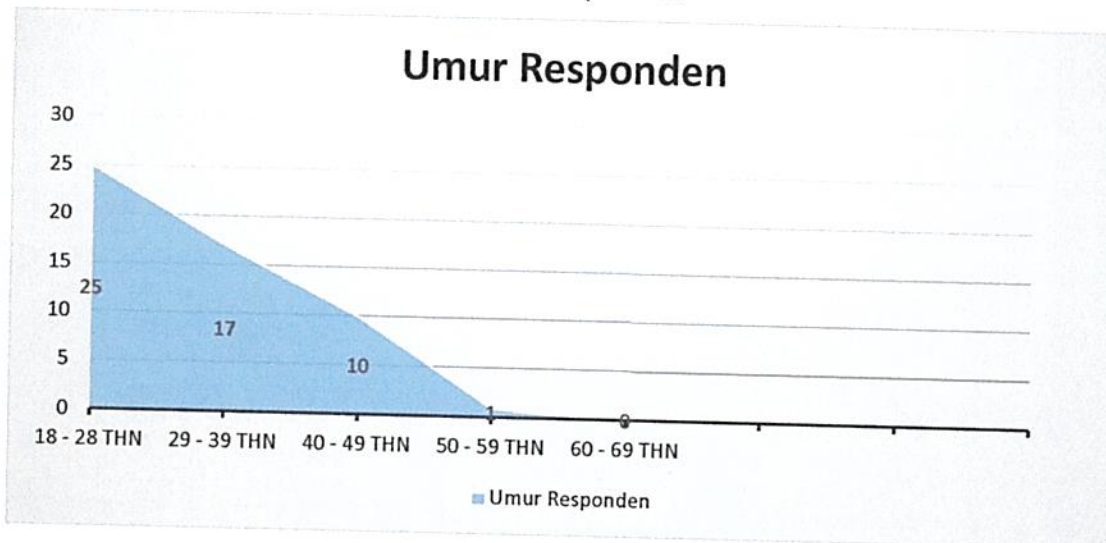
BAB III
INDEKS SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

1. Tabel Data Umur Responden

Tabel 4

No	Deskripsi	Jumlah Orang	Persen
1	18 - 28 Thn	25	47,17%
2	29 - 39 Thn	17	32,08%
3	40 - 49 Thn	10	18,87%
4	50 - 59 Thn	1	1,89%
5	60 - 69 Thn	0	0
6	Total	53	100%

Grafik 1. Profil Responden Data Umur Responden

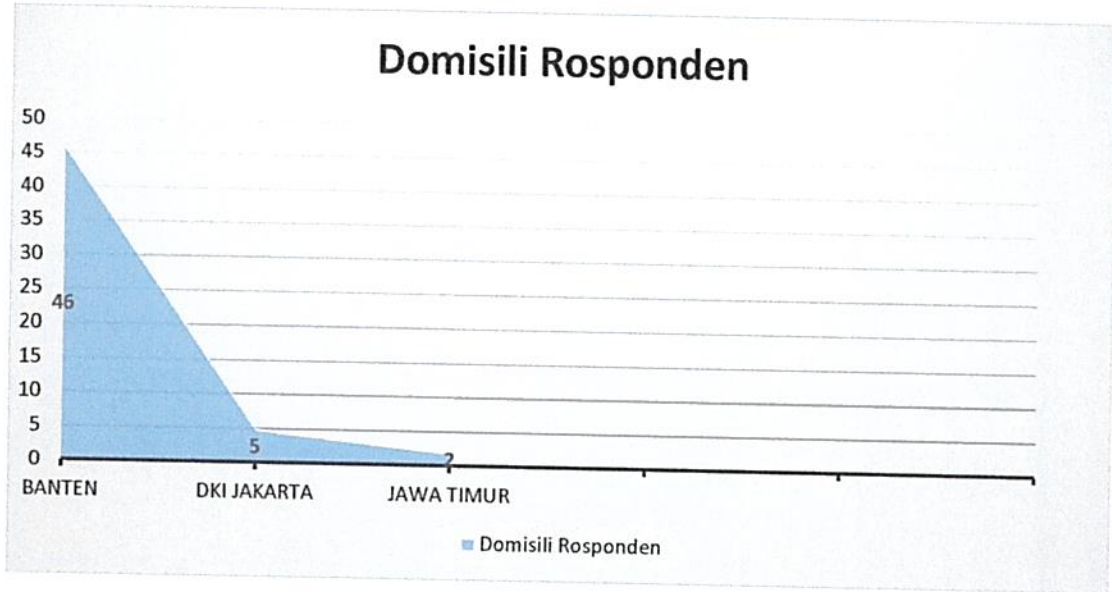


● **Tabel Data Domisili Responden**

Tabel 5

No	Daerah Domisili	Jumlah Orang
1	Banten	46
2	DKI Jakarta	5
3	Jawa Timur	2

Grafik 2. Profil Data Domisili Responden

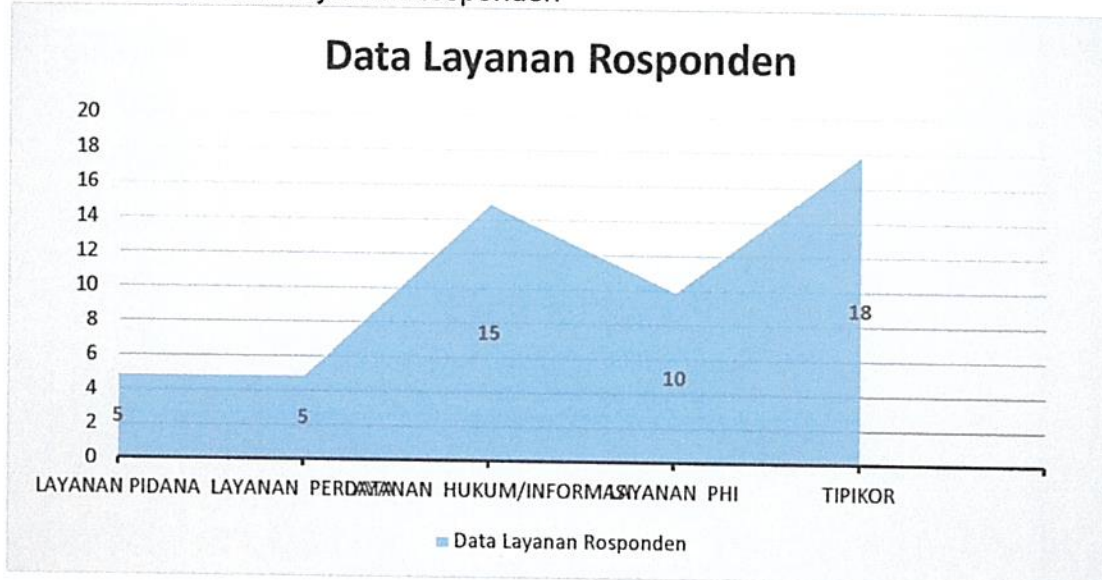


● Tabel Data Layanan

Tabel 6

No	Data Layanan	Jumlah Orang
1	Layanan Pidana	5
2	Layanan Perdata	5
3	Layanan Hukum/Informasi	15
4	Layanan PHI	10
5	Layanan Tipikor	18

Grafik 3. Profil Data Layanan Responden



● Tabel Nilai Per Unsur

Tabel 7

DESKRIPSI	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
JUMLAH	198	204	198	181	194	177	196	204	200	204
NILAI RATA - RATA	3,376	3,849	3,736	3,415	3,660	3,340	3,698	3,849	3,774	3,849
NRR TERTIMBANG	0,374	0,385	0,374	0,342	0,366	0,334	0,370	0,385	0,377	0,385

Berdasarkan urutan besarnya SPAK hasil dari penilaian masyarakat terdapat Tiga unsur yang tertinggi yaitu;

Tabel 8

No	Unsur Pertanyaan
1.	Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?
2.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan?
3.	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/ Panitera/ Staff Pengadilan diluar persidangan?

Berdasarkan urutan besarnya SPAK nasii dari penilaian masyarakat terdapat tiga unsur yang terendah yaitu;

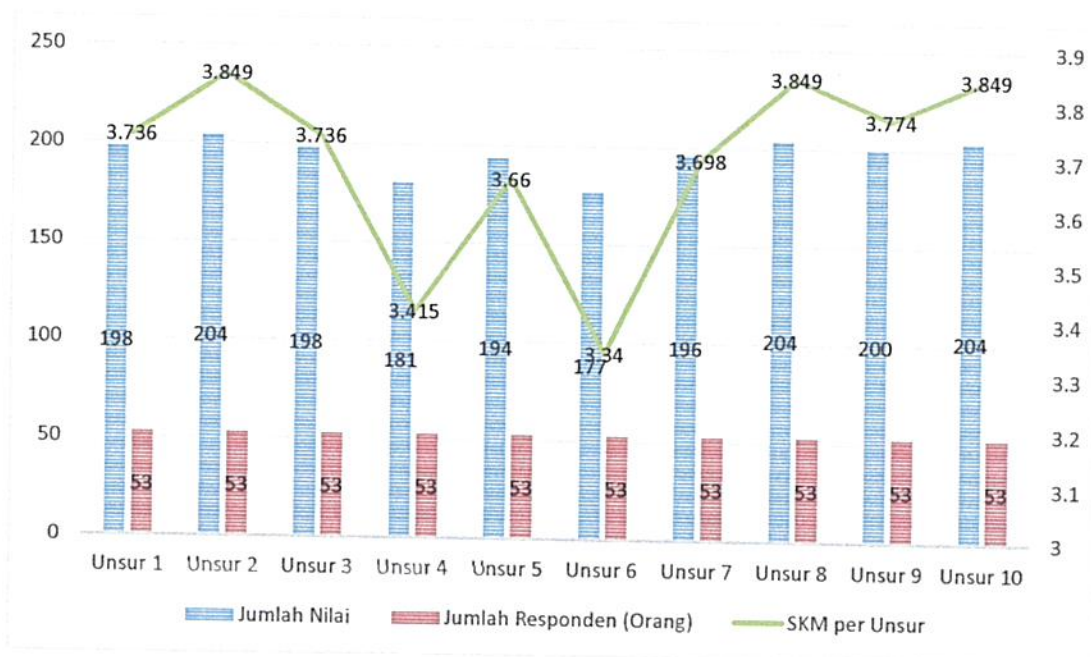
Tabel 9

No	Unsur Pertanyaan
1.	Apakah memberikan tanda terima kasih atas pelayanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta)?
2.	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/ biaya baik melalui website ataupun Petugas pelayanan di Pengadilan?
3.	Apakah di Pengadilan selalu membayar dengan tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?

Artinya dari 53 responden menilai bahwa petugas pelayanan pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang telah memberikan pelayanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Karakteristik jawaban responden per unsur pertanyaan.

Grafik 1. Nilai Survey Persepsi Anti Korupsi Berdasarkan Analisa Per Unsur



Indeks Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi dari skala 1- 4 Pengadilan Negeri PHI/Tipikor

Serang Kelas IA sebesar 3,69 atau 92,26%

Indeks 3,69 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI** Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 92,26%.

Tabel 10

Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Serang

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA, selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir korupsi.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Serang Kelas IA diperoleh informasi bahwa **Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA memiliki Indeks Survey Persepsi Anti Korupsi 3,69** berada pada angka 92,26% atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Prosedur Pelayanan, mendapat indeks 3,736;
2. Indikator pelayanan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan mendapat indeks 3,849;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,736;
4. Indikator Informasi Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,415;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,660;
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,340;
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,698;
8. Indikator Percaloan mendapat indeks 3,849;
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,774;
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,849;

Berdasarkan urutan besarnya IPK hasil dari penilaian masyarakat terdapat Tiga unsur yang tertinggi yaitu;

1. Unsur 2 mendapatkan Nilai 204
(Unsur mengenai Indikator penyalahgunaan jabatan)
2. Unsur 10 mendapatkan Nilai 204
(Unsur mengenai Indikator percaloan)

3. Unsur 8 mendapatkan Nilai 204

(Unsur mengenai Indikator Perbuatan Curang)

Berdasarkan urutan besarnya IPK hasil dari penilaian masyarakat terdapat Tiga unsur yang terendah yaitu;

1. Unsur 6 mendapatkan Nilai 177

(Unsur mengenai indikator Hadiah)

2. Unsur 4 mendapatkan Nilai 181

(Unsur mengenai Indikator Transparansi Biaya)

3. Unsur 5 mendapatkan Nilai 194

(Unsur mengenai indikator Transaksi Biaya)

Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA Periode Triwulan III Tahun 2023 tersebut diatas, menunjukkan bahwa indikator tertinggi memiliki indeks 3,849 dari Indikator Penyalahgunaan Jabatan. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Biaya Tambahan 3,340 paling rendah diantara indikator lainnya. Dengan demikian kedepan dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan maka untuk informasi biaya harus lebih transparan dan lebih disosialisasikan lagi kepada semua pengguna layanan.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI SERANG
 JL. K.H. ABDUL HADI NO. 29 KOTA SERANG
 BANTEN
<http://pn-serang.go.id>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
 Periode 1 Juli 2023 sampai 30 September 2023

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS
3,69 / 92,26%

Jumlah	53 RESPONDEN
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 33 PEREMPUAN : 20
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 1 SD : 0 Diploma 3 : 1 SMP : 0 S1 : 29 SMU : 19 S2 : 2 Diploma 1 : 1 S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 5 TNI : 0 POLRI : 0 LAINNYA : 29 SWASTA : 17 WIRUSAHA : 2 TENAGA KONTRAK : 0

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

- | | |
|---|-------|
| 1. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ? | 3,340 |
| 2. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? | 3,415 |
| 3. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? | 3,660 |

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

DATA REGISTER TINDAK LANJUT BELUM DIISI

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

5 Oktober 2023
 Ketua Pengadilan Negeri

Nama/Kode Responden	Pelayanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekam
1 Nur	Layanan Hukum / Informasi	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Kamis, 31 Agustus 2023 09:09:35 WIB
2 Anonim	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	2	4	1	4	4	4	4	4 Rabu, 16 Agustus 2023 11:01:50 WIB
3 Anonim	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	2	4	1	4	4	4	4	4 Rabu, 16 Agustus 2023 10:56:34 WIB
4 Anonim	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	1	1	4	4	4	4	4	4 Rabu, 16 Agustus 2023 10:52:26 WIB
5 Anonim	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Kamis, 27 Juli 2023 10:39:11 WIB
6 Cantika	Layanan Pidana	4	4	4	1	1	4	1	4	4	4	4 Kamis, 27 Juli 2023 10:06:20 WIB
7 Deviyanti	Layanan Hukum / Informasi	4	4	3	3	2	4	3	4	2	2	4 Kamis, 27 Juli 2023 09:42:57 WIB
8 Tilah	Layanan Hukum / Informasi	4	4	1	3	4	1	4	4	2	4	4 Kamis, 27 Juli 2023 08:54:57 WIB
9 Adi Gunawan	Layanan PHI	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4 Kamis, 27 Juli 2023 08:45:03 WIB
10 Siti Aisah	Layanan Hukum / Informasi	4	4	1	3	3	4	4	4	2	4	4 Kamis, 27 Juli 2023 08:27:07 WIB
11 Bagus Setiawan, S.H., M.H	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Jumat, 21 Juli 2023 10:56:37 WIB
12 Syarif Hidayatullah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Jumat, 21 Juli 2023 10:48:01 WIB
13 Anonim	Layanan Pidana	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4 Jumat, 21 Juli 2023 10:09:20 WIB
14 Bong Yohanes	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Jumat, 21 Juli 2023 10:04:20 WIB
15 Ita Andhlay	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3 Jumat, 21 Juli 2023 09:58:11 WIB
16 Meidana Pacadini	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Jumat, 21 Juli 2023 09:53:05 WIB
17 Tomi Mahendra, S.H	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4 Jumat, 21 Juli 2023 09:48:16 WIB
18 Sahlah Natasari	Layanan PHI	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3 Jumat, 21 Juli 2023 09:44:49 WIB
19 Lukmanul Hakim	Layanan Tipikor	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3 Jumat, 21 Juli 2023 09:40:19 WIB
20 Desi Lusiani Putri	Layanan PHI	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3 Jumat, 21 Juli 2023 09:36:19 WIB
21 Namira Mellyani K	Layanan Tipikor	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4 Jumat, 21 Juli 2023 09:28:41 WIB
22 Lukmanul Hakim	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Kamis, 20 Juli 2023 09:13:58 WIB
23 Sahlah Natasari	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4 Kamis, 20 Juli 2023 08:50:42 WIB
24 Toni Mahesa	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Kamis, 20 Juli 2023 08:39:01 WIB
25 Febriyanto	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Kamis, 13 Juli 2023 09:58:17 WIB
26 Agus	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Kamis, 13 Juli 2023 09:21:56 WIB
27 Anonim	Layanan Tipikor	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3 Selasa, 11 Juli 2023 10:02:27 WIB
28 Anonim	Layanan Tipikor	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3 Selasa, 11 Juli 2023 09:55:18 WIB
29 Anonim	Layanan Tipikor	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4 Selasa, 11 Juli 2023 09:44:59 WIB
30 Anonim	Layanan PHI	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4 Selasa, 11 Juli 2023 09:41:10 WIB
31 NABILA RIHHDATUL AISY	Layanan Tipikor	3	2	4	2	4	4	4	2	4	4	4 Selasa, 11 Juli 2023 09:31:46 WIB
32 FAHMI	Layanan Tipikor	4	3	4	4	2	1	1	4	4	4	4 Selasa, 11 Juli 2023 09:24:51 WIB
33 IQBAL	Layanan Tipikor	3	4	4	4	4	4	1	4	4	4	3 Selasa, 11 Juli 2023 09:18:31 WIB
34 T	Layanan PHI	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4 Selasa, 11 Juli 2023 09:12:46 WIB
35 SUNARYA	Layanan PHI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Selasa, 11 Juli 2023 09:06:10 WIB
36 Murdiyatna,S.H	Layanan PHI	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4 Selasa, 11 Juli 2023 08:59:33 WIB
37 Yunistara	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4	4 Selasa, 11 Juli 2023 08:52:31 WIB

